



## Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Titi Susilowati<sup>1</sup>, Sutaryat Trisnamansyah<sup>2</sup>, Cahya Syaodih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Nusantra Bandung, Indonesia

E-mail: [titisusilowati03@gmail.com](mailto:titisusilowati03@gmail.com), [yatsutaryat@ymail.com](mailto:yatsutaryat@ymail.com), [syaodih1969@gmail.com](mailto:syaodih1969@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-02-03 Revised: 2022-03-02 Published: 2022-03-16	The purpose of this study was to obtain an overview and analysis of the management of inclusive education in improving the quality of education based on aspects of planning, organizing, implementing, evaluating, hindering, and providing solutions to inclusive education in improving the quality of education. This research approach is a qualitative research with descriptive study method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that inclusive education planning in schools has been stated in the general RPP which is then modified/adjusted according to the abilities of each ABK. In organizing the implementation of inclusive education, the leadership assigns the inclusion coordinator directly. In organizing the school, it only includes part of the school curriculum / assisted by GPK to determine what kind of learning curriculum should be done. The implementation of inclusive education is implemented in the preparation of lesson plans for inclusive schools that look at students with special needs who are in their respective classes with what kind of obstacles.
<b>Keywords:</b> <i>Management;</i> <i>Inclusive Education;</i> <i>Quality of Education.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-02-03 Direvisi: 2022-03-02 Dipublikasi: 2022-03-16	Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan analisis tentang manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasar aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hambatan, dan solusi dalam pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, peyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan inklusi di Sekolah sudah dituangkan dalam pada RPP umum yang kemudian di modifikasi/di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, pimpinan menugaskan langsung koordinator inklusi. Dalam pengorganisasian Sekolah hanya memasukan bagian Kurikulum sekolah/dibantu GPK untuk menentukan kurikulum Pembelajaran seperti apa yang harus di kerjakan. Pelaksanaan pendidikan inklusi diimpelemetasikan pada penyusunan RPP bagi sekolah penyelenggara inklusif yang melihat dari siswa berkebutuhan khususnya yang berada di kelas masing-masing dengan jenis hambatan seperti apa untuk itu di susunlah RPP dalam bentuk menyesuaikan dalam capaian Pembelajaran pada peserta didik itu sendiri.
<b>Kata kunci:</b> <i>Manajemen;</i> <i>Pendidikan Inklusi;</i> <i>Mutu Pendidikan.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Dalam alinea 4 pembukaan UUD 45 ditegaskan bahwa, tujuan didirikannya negara salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia (UUD 1945), hal tersebut dapat diimplementasikan dengan memberikan kewajiban dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali, dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, tentunya banyak kendala dan terjadinya kesenjangan yang beragam dalam pendidikan terutama anak berkebutuhan khusus, salah satu implikasi serius ialah dalam memenuhi kebutuhan anak banyak mengalami kegagalan.

Menurut Botha dan Wolhuter dalam (Arifudin, 2020) bahwa mengembangkan kemampuan berperilaku masih banyak anak-anak yang tidak mengembangkannya kecuali oleh individu sehat secara mental. Dalam konteks kesenjangan tersebut akan tetap dilaksanakan dikarenakan pendidikan untuk semua (*education of all*). Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan sesuatu hal baru dalam penyediaan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu dalam pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan pendidikan harus dilaksanakan secara berkeadilan, demokratis, dan tidak diskri-

minat, serta dalam pasal 15 dan pasal 32 yang menjelaskan bahwa, Pendidikan khusus ialah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan berupa satuan pendidikan khusus atau secara inklusif. Agar dapat belajar sesuai dengan kemampuan kapasitas potensinya, di pendidikan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus dan anak normal dapat distimulasi, penyelenggaraan sekolah inklusif akan menjadi sangat relevan untuk peserta didik dari berbagai latar belakang untuk mengurangi diskriminasi, mewujudkan masyarakat yang terbuka dan inklusif dan tercapainya tujuan pendidikan, selain itu juga, pendidikan inklusif dapat menjadi peluang terhadap anak berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah di sekolah reguler. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, mengemukakan bahwa Pendidikan ialah kebutuhan primer bagi setiap orang untuk kehidupan yang lebih bermartabat, pendidikan Inklusif ialah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus serta mempunyai kemampuan dan potensi kecerdasan untuk mengikuti suatu pembelajaran di ruang lingkup pendidikan secara serempak bersama peserta didik pada umumnya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di wilayah nusantara, yang meliputi diantaranya tercapainya pemerataan dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Sementara peserta didik di lembaga pendidikan formal tidak hanya siswa yang memiliki potensi yang normal, melainkan ada juga peserta didik yang berkebutuhan khusus (Sofyan, 2020). Peserta didik berkebutuhan khusus tersebar diseluruh pelosok Indonesia, sedangkan sekolah-sekolah khusus yang memberikan layanan khusus bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas keberadaannya, oleh karena itu sekolah inklusif hadir untuk menampung Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang jauh dari sekolah khusus atau SLB, pendidikan inklusif hadir menjadi pilihan bagi PDBK yang hendak mengikuti pembelajaran di sekolah reguler, pendidikan inklusif adalah mewujudkan suatu kehidupan yang ramah tidak diskriminatif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah reguler, bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga kesempatan belajar mereka menjadi lebih luas, hal ini

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 1 dinyatakan bahwa Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang mengalami kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Di atas telah diuraikan mengenai pengertian inklusif, tergambar bahwa, proses pembelajaran bagi PDBK dilayani sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Menurut (Arifudin, 2022) bahwa kegiatan pembelajaran merupakan pelaksanaan kurikulum. Kurikulum yang digunakan bagi PDBK di sekolah reguler dapat dipastikan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual, pembelajaran yang diterapkan di kelas inklusi menerapkan prinsip pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (*student oriented*). Prinsip *student oriented* menurut (Arifudin, 2021) yakni menghendaki agar dalam pembelajaran mempertimbangkan karakteristik khas individual, baik dari segi potensi, hambatan, kebutuhan, maupun kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Dalam paradigma pendidikan, keberagaman peserta didik yang kebutuhan khusus sangat dihargai karena setiap anak memiliki latar belakang kehidupan budaya dan perkembangan yang berbeda-beda, oleh karena itu, setiap anak memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula, sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, dalam praktis pendidikan inklusif, penerimaan siswa baru harus memprioritaskan penerimaan didasarkan pada lokasi terdekat pada sekolah, tidak membatasi pada jenis dan derajat kelaianan anak, kurikulum harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan anak (ABK) dan kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik,

mendorong pengawas untuk membina secara rutin dan kebebasan untuk berinovasi. Hasil observasi lapangan tentang Pendidikan Inklusi pada satuan pendidikan Dasar di Kota Cianjur dan Kota Cimahi telah terimplementasi di 2 (dua) Sekolah Dasar hingga kini namun dari beberapa informasi yang penulis peroleh bahwa sekolah inklusi yang berada di Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi menemukan beberapa kendala, diantaranya tidak adanya regenerasi tenaga pendidik yang terlatih menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak mau repot dengan tugas tambahan program inklusi. Pelaksanaan pendidikan inklusi pada era otonomi daerah khususnya di Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi sebagian sekolah inklusi masih berjalan dengan lancar dan pada masa Pandemi Corona Virus Disease 19 ini dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh atau Dalam Jaringan (Daring) Internet dan sebagian SD Inklusi lain melaksanakannya dengan Daring Kombinasi, artinya selain pembelajaran tatap muka terbatas juga dilaksanakan Pembelajaran secara Online. Pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Bojongherang Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, diantaranya adalah:

1. Pemahaman dan sikap yang belum merata dikalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif;
2. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus;
3. Sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan upaya-upaya yang sistematis untuk membudayakan pendidikan inklusif, diharapkan kedepan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih baik dan dapat disosialisasikan oleh dinas terkait serta dapat mendeklarasikannya, kajian penulis dari hasil wawancara awal baik dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Cianjur dan Kota Cimahi maupun dengan pihak sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Bojongherang Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi, banyak kendala yang penulis temukan. Banyaknya persoalan yang ditemui dalam kendalanya penyelenggaraan sekolah inklusif di Kota Cianjur dan Kota Cimahi maka penulis batasi kepada

pokok permasalahan dalam judul tesis penulis, yaitu Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Bojongherang Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi, berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut untuk ikut memberikan solusi agar layanan pendidikan dapat berjalan melalui penelitian tesis dengan judul "Manajemen Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan" (Studi deskriptif di SDN Bojongherang Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan studi deskriptif di SDN Bojongherang Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa studi deskriptif, menurut (Arikuntoro, 2006) bahwa dalam istilah deskriptif yakni berasal dari bahasa Inggris yaitu *to describe*, yang artinya memaparkan atau menggambarkan sesuatu, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain sebagainya, dengan demikian, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa studi deskriptif adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata, hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam (Bahri, 2021) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-

fenomena yang hendak diteliti, dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian. Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan studi deskriptif di SDN Bojongherang Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya, pertanyaan disusun secara ketat dan pertanyaan sama pada setiap subjek (Sugiyono, 2015).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Nasser, 2021). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian, menurut Moleong dalam (Tanjung, 2021) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen, strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian, metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan studi deskriptif di SDN Bojongherang Kota Cianjur dan SD Hikmah Teladan Kota Cimahi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membahas hasil dan temuan penelitian ini, akan dilihat dimulai dari proses perencanaan, engorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hambatan dan solusi dalam pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### 1) Perencanaan Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses menetapkan tujuan dan memilih tujuan, strategi, kebijakan, prosedur dan program yang akan dilaksanakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Makna perencanaan itu sendiri di lakukan sebuah organisasi atau

lembaga pendidikan dalam hal ini sebagai cara memberikan kejelasan mengenai tujuan dari setiap kegiatan, sehingga pelaksanaannya mendapat hasil seefektif dan seefisien mungkin yang di sesuaikan dengan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut, begitu pula dengan perencanaan yang disusun oleh Sekolah dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di 2 (dua) Sekolah berdasar pada kebijakan yang ada sebagai payung hukum penyelenggaraan inklusi, kurikulum pendidikan inklusi, sumber daya manusia (SDM) dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini menjadi pertimbangan dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan inklusi, hal ini sejalan dengan (Hasbi, 2021) mendefinisikan perencanaan adalah "sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan mengidentifikasi berbagai tujuan kinerja organisasi, memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya dimasa mendatang".

Dari definisi di atas, istilah pendidikan inklusi menyiratkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas dididik di sekolah reguler bersama teman sebayanya yang biasanya berkembang dengan layanan yang sesuai mengenai kebutuhan belajar dasar mereka, tidak ada sekat-sekat antara setiap peserta didik, semua memiliki hak yang sama dalam memperoleh proses pendidikan secara bersamaan. Perencanaan pendidikan inklusi yang dibuat oleh 2 (dua) Sekolah dilakukan setiap awal semester dibuat PPI (Program Pembelajaran Individual) untuk semua ABK yang mengacu kepada kurikulum namun tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK yang diobservasi dari kelas sebelumnya, kemudian dibicarakan dengan ortu ABK yang bersangkutan untuk dibahas bersama, apakah sudah sesuai atau ada yang ingin ditambahkan.

#### 2) Pengorganisasian Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pengorganisasian dalam pengelolaan pendidikan inklusi dilakukan untuk mengatur siapa yang memiliki tugas dan tanggungjawab tertentu, yang pada dasarnya agar lebih jelas pengelolaannya, sehingga bisa mendukung pendidikan inklusi yang lebih baik, dibutuhkan pengorganisasian yang baik dalam rangka mengoptimalkan setiap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pengorganisasian yang

baik akan memberikan efisiensi dan efektivitas setiap proses manajemen yang dilakukan, termasuk pada pengelolaan pendidikan inklusi, berdasarkan hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK). Di atas telah diuraikan mengenai pengertian inklusif, tergambar bahwa, proses pembelajaran bagi PDBK dilayani sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut, kegiatan pembelajaran merupakan pelaksanaan kurikulum yang digunakan bagi PDBK di sekolah reguler dapat dipastikan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut, anak Berkebutuhan Khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Pembelajaran yang diterapkan di kelas inklusi menerapkan prinsip pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (*student oriented*), prinsip ini menghendaki agar dalam pembelajaran mempertimbangkan karakteristik khas individual, baik dari segi potensi, hambatan, kebutuhan, maupun kecepatan belajar masing-masing peserta didik.

### 3) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Proses optimalisasi kegiatan pendidikan inklusi di Sekolah sesuai dengan Peraturan menteri pendidikan nomor 70 tahun 2009 tentang sekolah inklusi yang mewajibkan agar pemerintah Kota/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan, dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, diawali dengan menyusun RPP bagi sekolah penyelenggara inklusi, hal ini bertujuan tentunya melihat dari siswa berkebutuhan khususnya yang berada di kelas masing-masing dengan jenis hambatan seperti apa untuk itu disusun RPP dalam bentuk menyesuaikan dalam capaian Pembelajaran pada peserta didik itu sendiri. Hal ini sejalan

dengan Sanjaya mengemukakan bahwa perencanaan adalah “proses pembelajaran meliputi program menyusun alokasi waktu, program tahunan, program semester, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran”. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), namun pada permendiknas tersebut perencanaan lebih ditekankan pada silabus dan RPP.

Implementasi pendidikan inklusi selain dalam proses keterpaduan pembelajaran dengan semua mata pelajaran, upaya lain yang dilakukan adalah setiap awal semester dibuat PPI (Program Pembelajaran Individual) untuk semua ABK yang mengacu kepada kurikulum namun tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK, kemudian dibicarakan dengan orang tua ABK yang bersangkutan untuk dibahas bersama, apakah sudah sesuai atau ada yang ingin ditambahkan. Tidak ada RPP khusus per harinya, karena pembelajaran bisa sangat tergantung pada mood, perilaku dan kemampuan ABK nya, hal ini sejalan dengan Raschake dan Bronson dalam (Marthan, 2007), tujuan pendidikan inklusi terbagi menjadi 3 yakni bagi anak berkebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusi yang ingin dicapai adalah tujuan bagi anak berkebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, bagi orang tua dan bagi masyarakat, dalam paradigma pendidikan, keberagaman peserta didik yang kebutuhan khusus sangat dihargai karena setiap anak memiliki latar belakang kehidupan budaya dan perkembangan yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap anak memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula, sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak.

Pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan untuk peningkatan mutu sekolah, serta fakta bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari pergerakan yang lebih besar menuju inklusi sosial, berkaitan dengan hal-hal di atas, dalam praktis pendidikan inklusif, penerimaan siswa baru memprioritaskan penerimaan didasarkan pada

lokasi terdekat pada sekolah, tidak membatasi pada jenis dan derajat kelaianan anak, kurikulum harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan anak (ABK) dan kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong pengawas untuk membina secara rutin dan kebebasan untuk berinovasi.

#### **4) Evaluasi Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi yang dilakukan oleh Sekolah dalam rangka melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan inklusi, evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi secara umum dilakukan pada proses, dan program. Kedua pendekatan evaluasi tersebut dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan menitikberatkan pada aspek penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah, hal ini sejalan dengan (Darmawan, 2021) mendefinisikan evaluasi adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kenyataan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Evaluasi berguna untuk merencanakan secara sistematis agar evaluasi berjalan sesuai dengan apa yang di butuhkan atau di rencanakan (Shavab, 2021), untuk menjalankan proses evaluasi tersebut di butuhkan alat bantu manajerial di karenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, alat-alat bantu evaluasi ini berfungsi membantu mewujudkan proses evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini mencapai tujuan pendidikan inklusi.

Hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah bahwa kebijakan di masa pandemi sudah sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusif, RPP yang dibuat mengakomodir dalam pembelajaran sebagai dasar acuan tujuan pembelajaran dalam pencapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif, untuk di RPP/Modul sudah sesuai dengan pada saat pandemic saat ini dimana pembelajaran di bagi menjadi dua bagian secara daring dan

luring, dalam pendidikan inklusi terdapat siswa normal dan berkebutuhan khusus, dalam rangka untuk menciptakan manusia yang berkembang seutuhnya maka diperlukan adanya pembinaan peserta didik, melalui pembinaan ini maka diharapkan peserta didik mampu berkembang dan memiliki keterampilan secara optimal. Adapun evaluasi pendidikan inklusi dilakukan yakni sebagai berikut: Pertama, evaluasi terhadap proses pelaksanaan pendidikan inklusi yang dilakukan sekolah mulai tahap penyusunan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaannya. Proses ini dilakukan dalam rangka mengukur kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pendidikan inklusi tersebut, adapun pelaksanaan evaluasi terhadap proses dilakukan secara terintegrasi dalam evaluasi harian, tengah semester dan akhir semester. Bentuk evaluasi tersebut dengan mengidentifikasi perkembangan capaian hierarki perilaku peserta didik dari waktu ke waktu melalui suatu identifikasi dan pengamatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas berjalannya kegiatan pendidikan inklusi, evaluasi dalam kelas melibatkan guru pembimbing khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus, sedangkan di luar kelas melibatkan Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, guru lain, dan tenaga kependidikan, sedangkan evaluasi di rumah melibatkan peserta didik, orang tua atau walinya. Kedua, evaluasi terhadap program pendidikan inklusi di sekolah untuk mengetahui ketercapaian target dari keseluruhan tujuan program kegiatan pendidikan inklusi, Pelaksanaannya dilakukan sekolah setiap akhir tahun pelajaran dengan melibatkan seluruh warga sekolah, hal ini diharapkan dapat menghasilkan hasil evaluasi yang objektif guna menghasilkan referensi perbaikan di masa mendatang.

#### **5) Hambatan Dalam Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pendidikan inklusi di 2 (dua) Sekolah diantaranya :

- a) Harapan orang tua terlalu tinggi (tidak sesuai dengan kemampuan anak), orang tua kurang kooperatif sehingga tidak ada kesinambungan antara program di sekolah dengan di rumah.
- b) Belum semua GPK memahami metode bagaimana yang seharusnya diterapkan

untuk anak tertentu. Terkadang sulit menjabarkannya dalam bentuk tulisan yang 'nyaman' dibaca khususnya oleh orang tua ABK.

- c) Mood dan perilaku ABK yang tidak menentu
- d) Terkadang ada perbedaan pendapat antara GPK dengan pihak manajemen dalam mengelola program inklusi.
- e) Kurangnya alat media dan daya dukung dari lingkungan dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif yang berada di Kota Cianjur.
- f) Masih banyak kekurangan GPK dan kesejahteraan serta daya dukung dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif masih kurang kami menggunakan seadanya dengan tidak mengurangi pada pembelajaran.

Hambatan-hambatan ini relatif sama dirasakan oleh kedua Sekolah, mengingat kedua Sekolah ini merupakan Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi relatif sudah lama. Hal ini yang menjadi hambatan-hambatan yang umum dihadapi oleh penyelenggara pendidikan inklusi tersebut, faktor penghambat ini yang menjadi masalah dalam memberikan pelayanan maksimal bagi pembelajaran inklusi di Sekolah, hal ini tidak sejalan dengan Kotler dalam (Tanjung, 2020) yang mengemukakan bahwa adalah "setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri, perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi", berdasarkan hal tersebut kualitas pelayanan dapat diartikan suatu tindakan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian sesuatu harapan konsumen yang diinginkan, termasuk kualitas pelayanan pendidikan inklusi, disamping harus mendapat kepedulian dari komite sekolah atau orang tua dalam mendorong layanan pendidikan inklusi yang optimal.

#### 6) Solusi Dalam Pendidikan Inklusi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Adapun solusi untuk menghadapi hambatan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan di 2 (dua) Sekolah tersebut diantara-

nya adalah sebagai berikut:

- a) Guru-guru dan pihak manajemen selalu berdiskusi untuk membahas segala permasalahan yang ada di sekolah dan mencari solusinya secara rutin seminggu sekali.
- b) Mendatangkan tim ahli untuk memberikan masukan kepada guru-guru, bisa dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop dsb.
- c) GPK bisa membuat soal ulangan sendiri untuk ABK yang didampinginya atau memodifikasi soal ulangan dari soal ulangan umum yang sudah dibuat oleh guru bidang studinya
- d) Kerjasama dan meningkatkan pada kemandirian pada peningkatan mutu pendidikan inklusi dimana dengan mengajak Guru, Kepala Sekolah, Orang Tua dan masyarakat dalam meningkatkan pada pelayanan pendidikan inklusi.
- e) Mengoptimalkan Tim POKJA yang sudah dibentuk dengan sesuai struktur pengorganisasian, dimana dalam semua bidang dinas pendidikan dan sekolah terlibat di dalamnya. Hal ini terkait membuat soal dengan bantuan dari SLB terdekat dalam menentukan soal yang di sesui dengan peserta didik di masing-masing sekolah secara terorganisir.

Solusi ini berdampak pada penanggulangan masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, diharapkan dengan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan inklusi, di masa mendatang akan semakin baik dan dapat memberikan layanan pendidikan pada setiap peserta didik berkebutuhan khusus.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan pendekatan manajemen pendidikan sudah menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen, dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen pendidikan tersebut, Guru sebagai eksekutor bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penge-lolaan manajemen pendidikan inklusi yang dijalankan sudah baik terlihat dengan adanya program yang terukur dan kegiatan yang ada dalam lembaga pendidikan mengacu pada kebutuhan ABK, dari penge-lolaan sekolah tersebut, berdampak kepada mutu pendidikan, namun fakta di lapangan hal tersebut masih belum

optimal dan hasilnya belum sesuai dengan yang di-harapkan semua pihak. Hal ini di sebabkan adanya beberapa faktor yang di indikasikan sebagai penghambat, baik bersifat internal maupun eksternal, sehingga lembaga pendidikan terus berbenah diri dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, solusi yang dilakukan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan membangun sinergi semua pihak dalam masyarakat pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi ke depan lebih baik.

## B. Saran

Dari analisis hasil penelitian manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, ada beberapa rekomendasi yang dapat penulis ajukan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Dinas Pendidikan

Diharapkan menjadi bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dengan memberikan perhatian khusus tentang komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, selain itu Perlu adanya peran aktif dari berbagai lembaga terkait termasuk lembaga Pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi khususnya jurusan pendidikan luar biasa belum berperan aktif dalam melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

### 2. Kepala Sekolah

Diharapkan dapat memberikan referensi dalam upaya meningkatkan pemahaman Kepala Sekolah terhadap konsep pendidikan inklusif yang masih sangat terbatas dan sangat bervariasi sehingga perlu adanya kesepahaman tentang pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus, hal ini juga penting dalam rangka pengambilan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

### 3. Guru

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi komprehensif tentang pentingnya perhatian, dukungan dan pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusif yang masih sangat terbatas dan sangat bervariasi sehingga perlu adanya kesepahaman tentang pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus.

### 4. Peneliti lainnya

Diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang belum optimal dalam penyelenggaraannya. Selain itu dapat menjadi penelitian lanjutan terhadap kebijakan yang mengarah kepada layanan pendidikan inklusif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Apiyani, A. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499-504.
- Arikunto, S. (2006). *prosedur penelitian suatu pendekata praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169.
- Arifudin, O. (2020). *Psikologi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Arifudin, O. (2021). *Pembelajaran Digital*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Arifudin, O. (2022). Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Membina Karakter Peserta Didik. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 829-837.
- Bahri, A. S. (2021). *Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Darmawan, I. P. A. (2021). *Total Quality Management Dalam Dunia Pendidikan" Model, Teknik Dan Impementasi"*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213-220.

- Hasbi, I. (2021). *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Irwansyah, R. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Jauhari. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ijtimaia.*, 1(1), 23-38.
- Khori. (2020). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar.*, 5(1), 1-5.
- Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursalim. (2010). Identifikasi Perilaku Perataan Laba Melalui Berbagai Konsep Laba. *Jurnal JAAL.*, 14(1), 134-140.
- Marthan. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusi*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.
- Na'im, Z. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biomatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100-109.
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah LLDIKTI IV. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237-242.
- Sanjaya. (2008). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaeman, D. (2022). Implementasi Media Peraga dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 71-77.
- Supriani, Y. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332-338.
- Sunaryo. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusi. *Jurnal: JAHL Anaku.*, 10(2), 184-200.
- Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusi: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tanjung, R. (2020). *Manajemen Pemasaran Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Tanjung, R. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 291-296.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339-348.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Trimo. (2012). Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Kajian Aplikatif Pentingnya Menghargai Keberagaman Bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal JMP.*, 1(2), 224-239.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153-161.
- Yunita. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education.*, 3(3), 267-274.